

Haru Bupati Buton Selatan H Muh Adios di Tengah Antusiasme Warga pada Bakti Sosial Terpadu, Beri Pesan Moral Lewat Pantun



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai kegiatan bakti sosial terpadu yang digelar di Rujab Bupati Kabupaten Buton Selatan. Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios S.Sos MBA menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Yayasan Sahabat Muadz Indonesia dan para mitra yang telah menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati mengaku terharu dan sulit mengungkapkan perasaan bahagianya dengan kata-kata. Ia bahkan menyampaikan ungkapan tersebut melalui pantun sebagai bentuk rasa syukur

Lanjut ke Hal: 7

Buton Selatan Siap 'Unjuk Gigi' di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen



Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Buton Selatan Maderuddin

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) mematangkan persiapan untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi Harmoni Sultra 2026. Hingga saat ini, sebagai dinas teknis yang mengkoordinir informasi Harmoni Sultra di Buton Selatan, kesiapan pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah

mencapai 90 persen. "Buton Selatan Siap 'Unjuk Gigi' di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen,"

Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Busel Maderuddin, Buton Selatan Siap 'Unjuk Gigi' di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen

Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Busel Maderuddin, Buton Selatan Siap "Unjuk Gigi" di Harmoni Sultra 2026, Per-

siapan Capai 90 Persen

"Kepala Dinas Parekraf Buton Selatan Maderuddin menjelaskan bahwa keikutsertaan tahun ini berfokus pada promosi potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah, baik di level regional maupun nasional.

Fokus Agenda Unggulan

Dalam ajang tersebut,

Lanjut ke Hal: 7

Dinas Pendidikan Buton Selatan Perkuat SDM Kepala Sekolah dan Guru Menuju Transformasi Pendidikan Lewat Pelatihan Pembelajaran Mendalam



Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan La Ode Bariu SPd

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP -Upaya mendorong transformasi pendidikan di Kabupaten Buton Selatan terus diperkuat melalui pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru Sekolah Dasar (SD) yang digelar selama empat hari di salah satu hotel, dengan fokus pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar berbasis pemahaman konsep.

Program ini merupakan bagian dari strategi Dinas Pendidikan Buton Selatan dalam menjawab tantangan perubahan sistem pendidikan, terutama di era digital yang menuntut

kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik sejak dini.

Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan La Ode Bariu SPd menegaskan bahwa peningkatan kapasitas guru menjadi fondasi utama dalam transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

"Langkah awal yang paling penting adalah peningkatan sumber daya manusia, khususnya guru. Mereka harus dibekali kemampuan pedagogik dan digital," ujar La Bariu.

Pelatihan ini melibatkan kepala sekolah dan perwakilan guru SD, dengan menghadirkan pemerhati dari Balai Guru dan

Tenaga Kependidikan (BGTK) Kendari, serta dua kepala sekolah yang telah lebih dulu mengikuti pelatihan serupa untuk berbagi praktik baik.

Dalam pelaksanaannya, peserta dibekali pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, bukan sekadar hafalan.

La Bariu menjelaskan metode ini mendorong siswa memahami hubungan sebab-akibat dalam setiap materi pembelajaran.

"Misalnya dalam menjelaskan fenomena kilat, siswa tidak hanya menghafal

Lanjut ke Hal: 7

OPINI

KARTINI BUTON SELATAN : ANTARA CAPAIAN DAN TANTANGAN DATA PEREMPUAN

TANGGAL 21 April selalu mengingatkan kita pada perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membuka ruang bagi perempuan untuk maju. Namun, di balik semangat itu, ada satu hal yang tak boleh diabaikan: sejauh mana perempuan di Kabupaten Buton Selatan benar-benar telah bergerak maju, bukan sekadar dalam narasi, tetapi dalam angka dan realitas.

Data terbaru menunjukkan bahwa perempuan bukan lagi kelompok pinggir. Dari total 104.538 penduduk, sebanyak 53.119 adalah perempuan, melampaui jumlah laki-laki yang mencapai 51.419 jiwa. Ini bukan sekadar statistik, melainkan penanda bahwa perempuan adalah kekuatan demografis yang strategis dalam pembangunan daerah. Data ini bersumber dari publikasi Kabu-



Penulis: Wiwi Siu Kaimudin, SE., M.Si Statistisi Ahli Muda

paten Buton Selatan dalam Angka 2026.

Di bidang pendidikan, capaian perempuan patut diapresiasi. Angka melek aksara perempuan usia 15-24 tahun telah mencapai 100

persen, setara dengan laki-laki. Ini menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan dasar telah terbuka lebar. Bahkan dalam struktur aparatur sipil negara, perempuan menunjukkan kehadiran yang kuat, jumlahnya melampaui laki-laki. Sebuah indikasi bahwa ruang formal pemerintahan mulai inklusif.

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen, seorang ekonom asal India yang meraih Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1998 dan dikenal dengan teori pembangunan berbasis kebebasan. Ia menekankan bahwa pembangunan sejatinya adalah perluasan kebebasan manusia, termasuk kebebasan perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam

Lanjut ke Hal: 7

Haru Bupati Buton Selatan H Muh Adios di Tengah Antusiasme Warga pada Bakti Sosial Terpadu, Beri Pesan Moral Lewat Pantun

dan penghormatan kepada rombongan bakti sosial.

Berikut pantun yang disampaikan Bupati Buton Selatan H Muh Adios

“Rumah Batu Jendela Kaca

Tempat Tinggal si Nabi Musa

Peduli Apa Orang Berkata

Bakti Sosial Terpadu Luar Biasa”

Ratausan masyarakat yang memadati Rujab Bupati Buton Selatan menyambut pantun itu dengan tepuk tangan meriah.

Bupati H Muh Adios secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Direktur Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC.M.Pd, atas kontribusi yang dinilai sangat besar bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus ber-

lanjut di masa mendatang.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pimpinan PT Sabina Samudera Shipping beserta rombongan yang turut berpartisipasi. Menurutnya, kontribusi tersebut bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk pengabdian tulus untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung nilai “hutang budi” yang menurutnya tidak dapat terbalaskan dengan materi. Ia kembali menyampaikan pantun yang sarat makna: “Hutang emas dapat dibayar, tapi hutang budi dibawa mati.”

Berikut Petikan pantun yang diucapkan Bupati Busel H Muh Adios

“Pisang Emas Dibawah Berlayar

Masak Sebihi di Dalam Peti

Utang Emas Itu Dapat Kita Bayar Tapi Utang Budi Itu Dibawa Mati”

“Saya berutang budi,” kata Bupati Busel H Muh. Adios, singkat.

Lebih lanjut, ia berbagi kisah pribadi tentang keluarga dan perjalanan hidup, termasuk anaknya yang telah lama bekerja di luar negeri. Hal tersebut menjadi refleksi bahwa kesuksesan tidak lepas dari nilai kerja keras dan niat tulus karena Allah.

Di akhir sambutannya, Bupati memberikan pesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan menjadikan jabatan sebagai sarana berbuat kebaikan.

“Jabatan adalah modal untuk menuju

akhirat. Berbuatlah yang terbaik karena kita tidak tahu kapan ajal datang,” pesannya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga serta memperlakukan sesama dengan kelembutan, termasuk dalam kepemimpinan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat terus memperkuat jaringan kolaborasi serta mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam kegiatan sosial demi kesejahteraan masyarakat Buton Selatan.

Kegiatan bakti sosial terpadu ini sekaligus menjadi simbol bahwa kepedulian sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dalam semangat kebersamaan. (*)

KARTINI BUTON SELATAN : ANTARA CAPAIAN DAN TANTANGAN DATA PEREMPUAN

kehidupan publik.

Namun demikian, tantangan kesetaraan masih nyata, terutama dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang belum sepenuhnya setara.

Hal ini juga tercermin di Buton Selatan. Kemajuan di bidang pendidikan dan birokrasi belum sepenuhnya linear dengan kondisi di sektor ekonomi. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja masih sedikit dibanding laki-laki, sementara jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga jauh lebih tinggi. Fakta ini menegaskan bahwa peran domestik masih menjadi beban utama yang melekat pada perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini terlihat nyata. Tidak sedikit perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah bahkan perguruan tinggi, namun setelah menikah lebih banyak berada di rumah untuk mengurus anak dan keluarga. Di sisi lain, banyak perempuan yang sebenarnya aktif secara ekonomi, seperti berdagang kecil di pasar, membantu usaha keluarga, atau mengolah hasil kebun dan laut, namun aktivitas tersebut sering kali berada dalam skala informal atau tidak berorientasi pasar secara langsung.

Dalam kerangka statistik ketenagakerjaan, sebagian aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tidak dibayar atau kegiatan rumah tangga, sehingga kontribusi ekonomi perempuan belum sepenuhnya tercermin dalam indikator formal, padahal perannya sangat signifikan dalam menopang ekonomi keluarga.

Kondisi ini mengingatkan pada gagasan Simone de Beauvoir, seorang filsuf dan pemikir feminis asal Prancis, yang menyatakan bahwa perempuan kerap dikonstruksikan dalam peran domestik oleh sistem sosial, sehingga akses mereka terhadap ruang publik menjadi terbatas. Artinya, persoalan yang dihadapi perempuan bukan semata pilihan individu, tetapi juga hasil dari struktur sosial yang perlu diubah.

Selain itu, data yang telah tersedia perlu dimanfaatkan secara lebih optimal untuk melihat peran perempuan secara utuh dalam pem-

beradaptasi dengan teknologi digital secara cepat. Dalam konteks lokal, Buton Selatan berupaya mengakselerasi perubahan tersebut dengan memastikan kesiapan guru sebagai aktor utama di ruang kelas. La Bariu menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Tiga komponen utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, harus berjalan seimbang agar hasilnya optimal,” ujarnya. Ia menambahkan, peran orang tua sangat penting, terutama dalam mendampingi anak belajar di rumah sebagai fondasi pendidikan dasar.

Dengan sinergi antara peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pembelajaran, serta dukungan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan optimistis kualitas pendidikan di daerah tersebut dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. (*)

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Kesenjangan yang terjadi hari ini bukan lagi soal akses pendidikan, tetapi soal akses kesempatan. Perempuan Buton Selatan telah memiliki kapasitas, namun belum seluruhnya memperoleh ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan aktivitas produktif.

Melalui pemanfaatan data tersebut, kita tidak hanya memahami berapa banyak perempuan yang bekerja, tetapi juga bagaimana mereka berperan, baik di sektor formal maupun dalam mendukung ekonomi keluarga. Dengan pemahaman yang lebih utuh ini, kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan di lapangan.

Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi, maka daerah berisiko kehilangan potensi besar. Sebaliknya, jika perempuan diberi ruang dan dukungan yang memadai, mereka dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

Semangat Kartini hari ini menuntut lebih dari sekadar penghormatan simbolik. Ia menuntut keberanian untuk membuka ruang yang lebih luas, dalam pekerjaan, usaha, dan kepemimpinan. Perempuan perlu memiliki pilihan, suara, dan kendali atas hidupnya. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih tangguh, dan pembangunan menjadi lebih adil.

Perempuan Buton Selatan telah membuktikan bahwa mereka mampu, dalam pendidikan, birokrasi, dan kehidupan sosial. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kemampuan tersebut tidak berhenti sebagai potensi, tetapi benar-benar menjelma menjadi kekuatan pembangunan.

Kartini telah membuka jalan. Kini, tugas kita adalah memastikan perempuan tidak hanya berjalan di jalan itu, tetapi juga memimpin arah perjalanan pembangunan ke depan.

Perempuan Berdaya, Buton Selatan Maju.

Buton Selatan Siap ‘Unjuk Gigi’ di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen

Buton Selatan akan mengikuti sejumlah agenda utama yang merepresentasikan identitas daerah, di antaranya “Karnaval Budaya, Menampilkan kekayaan tradisi dan adat istiadat Buton Selatan. Pameran Ekonomi Kreatif, Mempromosikan produk UMKM unggulan seperti Kopi Rongi, abon ikan, dan bawang goreng.

“Lomba Cipta Menu Pangan Lokal, Melibatkan Tim Penggerak PKK untuk mengolah bahan pangan khas daerah menjadi hidangan inovatif. “Lomba Lagu Eksekutif, Akan diikuti langsung oleh jajaran kepala daerah sebagai bentuk dukungan dan eksposur publik.

“Aksi Hemat Energi, Partisipasi unik berupa kegiatan bersepeda yang akan diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Sultra.

“Kami sudah menyiapkan segala kebutuhan teknis, termasuk sepeda yang akan digunakan oleh Bupati Buton Selatan, H. Muh. Adios, dalam kegiatan hemat energi nanti,” ujar Maderuddin.

Promosi Berkelanjutan

Maderuddin menegaskan bahwa kehadiran Busel di Harmoni Sultra bukan sekadar seremonial. Salah satu daya tarik yang disiapkan adalah kerja sama dengan pihak Dirgantara, di mana bendera daerah Buton Selatan akan dikibarkan di angkasa oleh penerjun payung dari TNI AU.

“Tujuan utama kita adalah dampak jangka panjang. Bagaimana produk UMKM dan budaya kita semakin dikenal luas sehingga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi

masyarakat,” tambahnya

Agenda Lanjutan di Tahun 2026 di Buton Selatan akan ada Festival Teluk Lande

“Selain fokus pada Harmoni Sultra, Pemkab Busel juga tengah menyiapkan agenda besar lainnya, yaitu Festival Budaya di Kawasan Teluk Lande yang direncanakan pada Agustus 2026. Berkaca dari kesuksesan tahun lalu yang berhasil menarik wisatawan mancanegara, festival ini akan melibatkan partisipasi para pelaku usaha dan UMKM serta pelaku seni lokal untuk menyambut event ini agar berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar, Ujarnya.

Keseriusan Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios dalam mempromosikan poten-

si wisatanya pun membuah hasil. Festival Teluk Lande kini resmi tercatat dalam Kalender Event Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengakuan ini menegaskan posisi Buton Selatan sebagai salah satu titik destinasi strategis di Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap jengkal potensi di Teluk Lande memberikan manfaat nyata. Dengan persiapan yang matang, kami optimis Buton Selatan mampu tampil maksimal dan memperkuat citranya sebagai pusat wisata budaya dan ekonomi kreatif unggulan,” ucap Maderuddin.

“Melalui perpaduan keindahan alam Teluk Lande dan kekayaan tradisi lokal, Festival ini diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pelancong nusantara maupun internasional di tahun 2026. (*)

Dinas Pendidikan Buton Selatan Perkuat SDM Kepala Sekolah dan Guru Menuju Transformasi Pendidikan Lewat Pelatihan Pembelajaran Mendalam

definisi, tetapi memahami proses terjadinya secara logis,” jelasnya.

Pendekatan kontekstual juga menjadi bagian penting dalam metode ini, di mana guru diminta mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa.

“Konsep magnet, misalnya, harus bisa dihubungkan dengan pengalaman nyata siswa agar lebih mudah dipahami,” tambah La Bar-

iu.

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh melalui forum internal sekolah maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). La Bariu menyebut pola tersebut sebagai efek berantai yang akan mempercepat adopsi metode pembelajaran mendalam di seluruh sekolah.

“Peserta pelatihan

akan menularkan kembali ilmunya kepada guru lain, sehingga dampaknya bisa meluas,” katanya.

Selain penguatan metode pembelajaran, Dinas Pendidikan Buton Selatan juga mendorong percepatan digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penerapan ujian berbasis komputer seperti Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Langkah ini sejalan

dengan kebijakan nasional yang sejak beberapa tahun terakhir mengarah pada digitalisasi pendidikan, termasuk penggantian Ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional pada 2021 yang menekankan literasi, numerasi, dan karakter.

Secara historis, pendekatan pembelajaran mendalam telah berkembang secara global sejak awal 2000-an, terutama di nega-

ra-negara maju seperti Finlandia dan Kanada yang mengedepankan critical thinking dibanding hafalan.

Di Indonesia sendiri, konsep ini mulai diperkuat melalui implementasi Kurikulum 2013 dan semakin diperdalam dalam Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pascapandemi COVID-19.

Pandemi tersebut juga menjadi titik balik penting dalam transformasi pendidikan dunia, ketika sistem pembelajaran jarak jauh memaksa guru dan siswa

beradaptasi dengan teknologi digital secara cepat.

Dalam konteks lokal, Buton Selatan berupaya mengakselerasi perubahan tersebut dengan memastikan kesiapan guru sebagai aktor utama di ruang kelas. La Bariu menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Tiga komponen utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, ha-

rus berjalan seimbang agar hasilnya optimal,” ujarnya. Ia menambahkan, peran orang tua sangat penting, terutama dalam mendampingi anak belajar di rumah sebagai fondasi pendidikan dasar.

Dengan sinergi antara peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pembelajaran, serta dukungan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan optimistis kualitas pendidikan di daerah tersebut dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. (*)

DPRD Buton Tengah Perkuat Evaluasi LKPJ Bupati 2025 Lewat Rapat Gabungan



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali ditegaskan DPRD Kabupaten Buton Tengah melalui rapat gabungan komisi yang membahas amandemen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Forum tersebut digelar di ruang rapat DPRD Buton Tengah pada Senin (13/4/2026), dengan melibatkan unsur legislatif dan eksekutif secara langsung.

Rapat ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam mengevaluasi capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah isu lintas sektor yang dinilai krusial, mulai dari efektivitas program pembangunan, capaian indikator kinerja, hingga optimalisasi penggunaan anggaran daerah. Pembahasan ini menunjukkan

meningkatnya peran DPRD dalam memastikan setiap kebijakan publik memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah, Mazaluddin, S.E., yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia didampingi Wakil Ketua II DPRD, Rusli, S.Pd., M.Si., dalam memimpin jalannya diskusi.

“Pembahasan LKPJ harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga ke depan dapat lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Mazaluddin dalam rapat tersebut.

Dari pihak eksekutif, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Buton Tengah, Armin, S.Pd., M.Si., hadir bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran OPD menjadi krusial karena mereka merupakan pelaksana teknis dari berbagai program yang dilaporkan dalam LKPJ.

Armin menekankan bahwa setiap OPD harus mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dan berbasis data atas berbagai catatan yang disampaikan DPRD. Menurutnya, transparansi informasi menjadi

ansinya menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“OPD harus proaktif memberikan penjelasan yang detail dan terukur agar setiap catatan DPRD dapat dijawab secara akurat dan transparan,” kata Armin.

Ia juga menambahkan bahwa proses amandemen LKPJ bukan hanya menjawab kritik, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang.

“Setiap evaluasi yang muncul harus kita jadikan dasar untuk memperbaiki kebijakan ke depan,” tambahnya.

Secara historis, kewajiban kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD merupakan amanat dari sistem desentralisasi yang mulai diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Regulasi ini menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam konteks global, praktik pelapo-

ran kinerja pemerintah daerah juga menjadi bagian dari tren good governance yang didorong oleh berbagai lembaga internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Bank Dunia. Kedua lembaga tersebut menekankan pentingnya sistem evaluasi berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Rapat gabungan komisi DPRD Buton Tengah ini sekaligus menjadi ruang sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam menilai keberhasilan serta mengidentifikasi kendala pembangunan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan pembahasan yang komprehensif dan berbasis data, DPRD berharap amandemen LKPJ Tahun 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Melalui forum ini pula, DPRD Buton Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan masyarakat serta standar praktik pemerintahan modern. (*)

DPR Tak Tergesa Bahas RUU Pemilu, Tahapan 2026 Dipastikan Tetap Jalan



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa, meskipun tahapan pemilu dijadwalkan mulai pada akhir 2026. DPR memilih mengedepankan kehati-hatian guna menghasilkan regulasi yang kuat dan minim celah hukum.

Menurut Dasco, tahapan pemilu tetap dapat berjalan dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku saat ini. Ia memastikan belum rampungnya revisi UU Pemilu tidak akan menghambat agenda konstitusional tersebut.

“Tahapan itu tidak ada kaitannya langsung dengan undang-undang yang baru. Dengan undang-undang yang lama, tahapan tetap bisa berjalan,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Ia menambahkan, pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi DPR. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu kerap digugat dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sehingga memunculkan perubahan aturan di tengah jalan.

Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco mengingatkan agar proses legislasi tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia menilai, percepatan pembahasan justru berisiko melahirkan aturan yang kembali dipersoalkan secara hukum.

“Jangan sampai kita buru-buru menetapkan undang-undang, lalu kembali digugat dan diputus berbeda oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya. Di sisi lain, DPR bersama partai-par-

tai politik masih melakukan simulasi dan pembahasan internal terkait berbagai opsi perubahan dalam RUU Pemilu. Kesepakatan lintas fraksi disebut menjadi kunci sebelum pembahasan resmi dimulai.

“Penentuan waktu pembahasan tidak bisa sepihak. Harus melalui kesepakatan fraksi-fraksi setelah mereka menyelesaikan kajiannya,” ujar Dasco.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan terdapat sepuluh isu utama yang akan dibahas dalam revisi UU Pemilu. Isu-isu tersebut mencakup persoalan klasik hingga tantangan kontemporer dalam sistem demokrasi.

Ia menjelaskan, salah satu isu penting adalah sistem pemilu legislatif, termasuk kemungkinan perubahan antara sistem proporsional terbuka, tertutup, atau kombinasi keduanya. Selain itu, ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden juga menjadi perhatian, terutama setelah adanya putusan MK.

“Ada sekitar 10 isu, lima bersifat klasik dan lima kontemporer, yang pasti akan kita bahas dalam revisi undang-undang pemilu,” kata Doli...

Isu lainnya meliputi perubahan jumlah kursi per daerah pemilihan, sistem konversi suara menjadi kursi di DPR, serta wacana pemisahan pemilu lokal dan nasional yang merujuk Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Selain itu, DPR juga menyoroti perlunya perbaikan sistem untuk menekan praktik politik uang, penguatan

digitalisasi dalam tahapan pemilu, evaluasi lembaga penyelenggara, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, termasuk wacana pembentukan peradilan khusus.

Secara historis, dinamika perubahan Undang-Undang Pemilu di Indonesia memang kerap terjadi. Sejak era reformasi 1998, regulasi pemilu telah beberapa kali direvisi untuk menyesuaikan perkembangan sistem demokrasi, termasuk perubahan signifikan pada Pemilu 2004 yang memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung.

Di tingkat global, revisi undang-undang pemilu juga menjadi praktik lazim di negara demokrasi. Negara seperti Jerman dan India, misalnya, secara berkala menyesuaikan aturan pemilu guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

Pengalaman internasional tersebut menunjukkan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu membutuhkan keseimbangan antara kecepatan dan kualitas. DPR menilai pendekatan kehati-hatian menjadi langkah penting untuk memastikan legitimasi hasil pemilu di masa depan.

Dengan demikian, meskipun tahapan Pemilu 2026 tetap berjalan sesuai jadwal, pembahasan RUU Pemilu akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, serta pengalaman historis agar menghasilkan aturan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. (*)

Kemendagri Dorong Denda Kehilangan e-KTP dalam Revisi UU Adminduk



ementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan penerapan sanksi berupa denda bagi masyarakat yang kehilangan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)

Laporan: Mashuri

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan penerapan sanksi berupa denda bagi masyarakat yang kehilangan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (20/4/2026), yang membahas sejumlah perubahan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul dari tingginya angka kehilangan dokumen kependudukan yang terjadi setiap hari di berbagai daerah.

“Setiap hari ada puluhan ribu dokumen kependudukan yang hilang dan harus dicetak ulang secara gratis oleh Disdukcapil,” ujar Bima dalam rapat tersebut.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan rendahnya tingkat tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dokumen penting, terutama karena tidak adanya konsekuensi finansial atas kehilangan tersebut.

“Banyak warga kurang bertanggung jawab dalam merawat KTP dan identitas lainnya. Karena gratis, kehilangan jadi hal yang dianggap biasa,” katanya.

Menurut Bima, pemberlakuan denda diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin dan berhati-hati dalam menyimpan dokumen kependudukan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menekan beban anggaran negara yang selama ini digunakan untuk mencetak ulang dokumen yang hilang tanpa biaya.

“Perlu dipikirkan agar warga lebih bertanggung jawab, salah satunya dengan mewajibkan membayar biaya penggantian atau denda,” ucapnya.

Namun demikian, Kemendagri menegaskan bahwa tidak semua kasus kehilangan akan dikenakan sanksi. Pemerintah akan memberikan pengecualian untuk kondisi tertentu yang berada di luar kendali masyarakat.

“Kondisi seperti bencana alam, perubahan elemen data, atau kerusakan karena faktor eksternal akan menjadi pengecualian,” kata Bima menambahkan.

Usulan ini merupakan satu dari 13 poin perubahan dalam revisi UU Adminduk yang saat ini tengah dibahas bersama DPR untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan nasional.

Secara historis, kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan signifikan, termasuk penerapan e-KTP secara nasional sejak 2011 yang bertujuan menciptakan satu data kependudukan terpadu.

Program e-KTP sendiri merupakan bagian dari upaya

modernisasi sistem identitas nasional yang mengadopsi teknologi biometrik, sejalan dengan praktik internasional di berbagai negara seperti India dengan sistem Aadhaar dan negara-negara Uni Eropa yang telah menerapkan identitas digital terintegrasi.

Di sejumlah negara, pengenaan biaya untuk penggantian dokumen identitas yang hilang sudah menjadi praktik umum sebagai bentuk tanggung jawab warga sekaligus mekanisme pengendalian administrasi.

Kemendagri berharap, melalui revisi UU Adminduk ini, sistem pelayanan kependudukan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas resmi.

Pembahasan lanjutan atas usulan tersebut masih akan dilakukan bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi regulasi yang mengikat secara nasional. (*)

Pemerintah Periksa Meta dan Google soal Perlindungan Pengguna Digital



Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperketat pengawasan terhadap platform digital global dengan memeriksa Meta dan Google atas dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan pengguna di Indonesia.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan penyelenggara sistem elektronik mematuhi regulasi nasional, khususnya terkait keamanan data dan hak pengguna di ruang digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara komprehensif dengan mengajukan puluhan pertanyaan untuk menggali informasi dari kedua perusahaan tersebut.

“Sebanyak 29 pertanyaan kami ajukan guna mendalami dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan pengguna,” ujar Alexander di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan masih dalam tahap analisis lebih lanjut untuk menentukan langkah berikutnya yang akan diambil pemerintah.

“Hasil pemeriksaan kedua plat-

form tersebut akan kami dalam lebih lanjut sebelum menentukan tindak lanjut,” katanya.

Pemeriksaan terhadap Meta telah dilakukan dan perusahaan tersebut telah menandatangani berita acara sebagai bagian dari proses administratif.

Sementara itu, Google memenuhi panggilan kedua dari pemerintah dan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama, menandai komitmen perusahaan untuk mengikuti proses yang berjalan.

Menurut Alexander, langkah ini merupakan bagian dari pengawasan aktif pemerintah untuk memastikan platform digital menjalankan tanggung jawabnya kepada publik.

“Pengawasan ini penting agar platform digital benar-benar melindungi pengguna sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.

Secara historis, pengawasan terhadap platform digital di Indonesia semakin menguat sejak diberlakukannya regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) beberapa tahun terakhir, yang mewajibkan perusahaan teknologi global mendaftar dan tunduk pada hukum nasional.

Di tingkat global, isu perlindungan data juga

menjadi perhatian serius setelah kasus Cambridge Analytica scandal pada 2018 yang melibatkan Meta (saat itu Facebook), serta meningkatnya pengawasan Uni Eropa melalui kebijakan General Data Protection Regulation (GDPR).

Indonesia sendiri terus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan global, termasuk melalui penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan terhadap ruang digital yang semakin kompleks.

Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, ini mencerminkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak segan menindak platform besar apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang merugikan pengguna.

Ke depan, Kemkomdigi memastikan akan terus melakukan pengawasan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat. (*)

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Dorong Pelestarian Budaya di Pesta Cumpea Mone Lakudo



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui momentum perayaan tradisional Pesta Kampung (Cumpea™) di Desa Mone, Kecamatan Lakudo, Senin (13/04/2026).

Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., yang hadir bersama Wakil Bupati Muh. Adam, S.Sos., menyampaikan bahwa pelestarian tradisi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari pembangunan identitas daerah.

“Lestarian budaya agar generasi tahu jati diri. Budaya adalah kebanggaan dan pemersatu kita,” ujar Azhari dalam sambutannya di Baruga Desa Mone.

Selain menyoroti aspek budaya, Bupati juga mengumumkan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui rencana operasional Kantor Cabang

Bulog Buton Tengah.

“Dengan hadirnya Bulog di daerah ini, harga beras yang sebelumnya sekitar Rp68.000 per 5 kilogram kita upayakan turun menjadi kisaran Rp60.000,” katanya.

Untuk memperluas distribusi bahan pokok, pemerintah daerah juga akan menghadirkan program “Kios Pangan Kita” di setiap desa sebagai perpanjangan tangan distribusi pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Dalam aspek kesejahteraan sosial, Bupati menginstruksikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

“Masyarakat yang sudah mampu harus memberi ruang bagi yang lebih membutuhkan. Keadilan sosial harus benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Kegiatan Cumpea yang berlangsung meriah tersebut turut dihadiri Wakapolres Buton Tengah, anggota DPRD, para kepala desa se-Kecamatan Lakudo, serta unsur Forkopimda dan Forkopimcam.

Di sisi lain, Azhari juga mempromosikan program Sekolah

Rakyat Buton Tengah sebagai bagian dari proyek strategis nasional di bidang pendidikan, khususnya untuk keluarga kurang mampu.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut karena seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh negara, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dalam konteks lingkungan, Bupati mengingatkan masyarakat pesisir untuk menjaga kebersihan laut dan tidak membuang sampah sembarangan, mengingat wilayah Buton Tengah memiliki potensi kelautan yang besar.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mulai bertani secara mandiri guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tengah dinamika ekonomi global.

Secara historis, tradisi seperti Cumpea merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Buton yang telah berlangsung turun-temurun sebagai bentuk syukur dan penguatan solidaritas sosial. Tradisi serupa di berbagai daerah di Indonesia, seperti sedekah laut di Jawa atau pesta adat di Sulawesi,

menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki fungsi sosial yang kuat dalam menjaga harmoni masyarakat.

Dalam konteks nasional, pelestarian budaya juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya sebagai aset bangsa.

Sementara secara global, penguatan identitas budaya lokal menjadi perhatian dunia, sebagaimana didorong oleh UNESCO melalui program perlindungan warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage), yang menempatkan tradisi lokal sebagai bagian penting dari keberagaman budaya dunia.

Menutup sambutannya, Bupati Azhari menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung tradisi lokal selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Selama tradisi ini memererat silaturahmi dan membawa manfaat, pemerintah akan selalu hadir untuk mendukung,” pungkasnya.*

Buton Siap Promosikan Wisata dan Budaya di Harmoni Sultra Sultra 2026



Laporan: La Harman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton menyiapkan strategi partisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2026 dengan menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal, mulai dari budaya hingga produk ekonomi kreatif. Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan yang digelar di Aula Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya daerah dalam mendukung perhelatan HUT Sultra yang mengusung tema ‘Harmoni Sultra’, sebuah konsep yang menekankan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, aman, sejahtera, dan religius.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., yang memimpin rapat mewakili Bupati Buton, menegaskan bahwa partisipasi daerah harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi tanpa pengurangan kualitas penampilan.

“Keikutsertaan ini tetap mengedepankan efisiensi dengan memaksimalkan potensi dan produk lokal yang kita miliki,” ujar Syamsudin.

Ia menambahkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat diharapkan mampu berkolaborasi secara optimal agar partisipasi Kabupaten Buton dapat memberikan dampak nyata, baik dari sisi promosi daerah maupun pember-

dayaan masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD terkait, antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, TP PKK, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), yang masing-masing diberi tanggung jawab dalam menyiapkan materi partisipasi.

Dalam pembahasan, Pemkab Buton merancang berbagai bentuk keikutsertaan, salah satunya melalui pameran produk unggulan daerah yang menampilkan hasil kerajinan tangan dan produk UMKM binaan Dekranasda, termasuk tenun khas Buton.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi fokus utama melalui promosi destinasi wisata Buton secara lebih luas,” kata Syamsudin.

Partisipasi lainnya meliputi lomba cipta menu berbasis pangan lokal yang diinisiasi oleh TP PKK. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong diversifikasi konsumsi masyarakat sekaligus mengangkat bahan pangan khas daerah.

Pemkab Buton juga akan ambil bagian dalam lomba tari kreasi daerah sebagai ruang ekspresi generasi muda dalam melestarikan seni budaya sekaligus memperkuat identitas lokal di tingkat provinsi.

Sementara itu, pawai budaya menjadi salah satu agenda utama yang akan diikuti sekitar 30 peserta dengan menampilkan bu-

sana adat, atraksi seni, serta narasi budaya khas Buton.

“Pawai budaya menjadi wajah daerah. Karena itu, kita harus tampil maksimal dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal,” ujarnya.

Selain pawai, pertunjukan seni tradisional berupa tari dan musik daerah juga akan ditampilkan secara terjadwal selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Secara historis, peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperingati setiap 27 April merupakan momentum penting sejak provinsi ini resmi dibentuk pada tahun 1964 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Sejak saat itu, perayaan HUT Sultra menjadi ajang konsolidasi pembangunan sekaligus promosi potensi daerah.

Di tingkat nasional, kegiatan serupa juga mencerminkan semangat otonomi daerah yang mulai diperkuat sejak reformasi 1998, di mana pemerintah daerah diberi ruang lebih besar untuk mengembangkan potensi lokal sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Sementara itu, secara global, konsep penguatan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya lokal sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pelestarian warisan budaya.

Melalui keikutsertaan dalam HUT Sultra 2026, Pemerintah Kabupaten Buton berharap dapat memperkuat citra daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.*

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Targetkan RSUD Buteng Jadi Rujukan, Muscab IDI Resmi Dibuka



Laporan: Ardi

BAUBAU, Upaya memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Buton Tengah terus dipacu. Pemerintah daerah menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat menjadi rujukan utama di kawasan Pulau Muna, seiring hampir rampungnya pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Target itu ditegaskan Bupati Buton Tengah, Azhari, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Pemekaran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Buton Tengah di Hotel Findi, Sabtu (11/04/2026).

Dalam forum tersebut, Azhari menekankan bahwa pembangunan fisik RSUD yang telah mencapai 97 persen harus diikuti dengan peningkatan manajemen dan kualitas pelayanan agar mampu bersaing secara regional.

"Tidak masuk akal kalau fasilitas kita bagus, tetapi pelayanan dan kesejahteraan tenaga medis tertinggal. Karena itu kita terapkan pola BLUD," ujar Azhari.

Ia menjelaskan, melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit akan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan serta kewenangan merekrut tenaga medis secara mandiri.

Menurutnya, dalam dua tahun awal, pe-

merintah daerah akan memberikan dukungan penuh sebelum RSUD dituntut mandiri secara operasional dan finansial.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga medis. Azhari menargetkan insentif dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Buton Tengah dapat bersaing dengan rumah sakit swasta.

"Saya ingin dokter di sini merasa dihargai. Kalau kesejahteraan baik, mereka akan betah dan pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal," katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga berencana menambah sekitar 70 tenaga kesehatan baru pada tahun ini guna memperkuat layanan di berbagai fasilitas kesehatan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah dokter di Buton Tengah saat ini baru mencapai sekitar 50 orang, angka yang masih terbatas dibanding kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, Azhari menyoroiti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buton Tengah yang masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah.

"IPM kita masih terendah di Sulawesi Tenggara. Ini mencerminkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup yang harus segera diperbai-

ki," ujarnya.

Secara historis, konsep peningkatan IPM mulai diperkenalkan oleh United Nations Development Programme sejak 1990 sebagai indikator utama pembangunan manusia yang tidak hanya bertumpu pada ekonomi, tetapi juga kesehatan dan pendidikan.

Di Indonesia, perhatian terhadap IPM semakin menguat sejak era reformasi, terutama setelah desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor kesehatan dan pendidikan.

Sejalan dengan itu, keberadaan organisasi profesi seperti IDI memiliki peran strategis dalam menjaga standar kompetensi dan etika profesi dokter di seluruh Indonesia.

Muscab IDI Buton Tengah yang mengusung tema "Konsolidasi Dokter Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Kesehatan" menjadi wadah konsolidasi sekaligus penguatan peran tenaga medis di daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan IDI Provinsi Sulawesi Tenggara, akademisi dari Universitas Halu Oleo, Dinas Kesehatan, direktur RSUD, serta organisasi profesi kesehatan lainnya.

Selain fokus pada

layanan kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sektor pendidikan tinggi melalui rencana pembukaan fakultas berbasis keparipateman yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari pemerintah pusat.

Dalam praktik global, integrasi antara layanan kesehatan, pendidikan, dan riset menjadi kunci kemajuan sistem kesehatan modern, sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju yang menjadikan rumah sakit sebagai pusat pelayanan sekaligus pendidikan.

Azhari pun menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang humanis sebagai bagian dari upaya penyembuhan pasien.

"Senyum dan keramahan tenaga medis adalah bagian dari terapi. Itu tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Ia juga mendorong agar posisi direktur RSUD diisi oleh dokter profesional yang memiliki integritas serta kemampuan manajerial yang kuat.

Melalui Muscab IDI ini, pemerintah daerah berharap tercipta sinergi yang solid antara tenaga medis dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Buton Tengah. (*)

Wamenkes Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG Berbasis AI Nasional

TANGGERANG SELATAN, BP- Pemerintah terus memperkuat pengawasan kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 18 April 2026, sebanyak 13.956 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau 52,69 persen dari total 26.489 unit operasional di 37 provinsi telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi indikator penting dalam menjamin mutu makanan siap saji yang didistribusikan kepada masyarakat.

Langkah tersebut diperkuat dengan percepatan penerbitan SLHS oleh dinas kesehatan daerah serta pengawasan berjenjang melalui inspeksi kesehatan lingkungan guna mencegah potensi kontaminasi dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. Dalam periode Maret 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 213.344 penjamah pangan telah mengikuti kursus keamanan pangan secara daring. Pada Februari 2026, tambahan 212 peserta lulus sebagai Fasilitator Penjamah Pangan, serta 6.219 kepala dan ahli gizi SPPG menyelesaikan program serupa.

Upaya tersebut juga didukung pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) melalui Command Center yang memungkinkan pemantauan distribusi makanan secara real-time, mulai dari mitra UMKM hingga sekolah penerima

manfaat.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga kualitas makanan. "Melalui dukungan teknologi AI dan pemantauan terpusat, kami memastikan setiap prosedur berjalan transparan dan higienis sehingga makanan yang diterima anak-anak tetap aman," ujarnya.

Implementasi pengawasan berbasis teknologi ini dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan program dalam menjaga konsistensi mutu selama satu tahun terakhir.

Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktovianus menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program tersebut saat meninjau langsung di Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan, Senin (20/4).

"Kami melihat kualitas makanan yang disajikan sangat baik dan kebersihannya terjaga. Yang paling penting, tidak ada laporan keracunan makanan sejak program ini berjalan," kata Benjamin.

Di sekolah tersebut, program MBG menasar 187 siswa berkebutuhan khusus dengan pendekatan adaptif, termasuk penyesuaian tekstur makanan serta pembatasan kandungan gluten dan MSG sesuai kebutuhan masing-masing siswa.

Menurut Benjamin, konsistensi pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan. "Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjalan efektif dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan berperan sebagai leading sector dalam menetapkan standar gizi dan keamanan pangan dengan men-

gacu pada Pedoman Gizi Seimbang dan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka malnutrisi dan stunting. Secara historis, Indonesia masih menghadapi tantangan gizi, di mana prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, namun masih memerlukan intervensi berkelanjutan.

Di tingkat global, program pemberian makanan bergizi di sekolah telah lama diterapkan, seperti National School Lunch Program di Amerika Serikat yang dimulai sejak 1946, serta berbagai inisiatif feeding program di negara-negara berkembang yang didukung oleh organisasi seperti World Food Programme (WFP).

Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sistem pengawasan, kualitas bahan pangan, serta edukasi gizi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Dengan mengadopsi pendekatan tersebut, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga membangun sistem keamanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

"Kami ingin memastikan program ini terus berjalan dengan standar tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan generasi mendatang," kata Benjamin.

Program ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan solusi inovatif di bidang kesehatan masyarakat.

Ke depan, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manu-

PT FAREN GRAFIKA



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasctio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Wakapolri Tinjau SPPG Baubau, Perkuat Dukungan Program Gizi Nasional



Wakapolri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Baubau

Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Baubau, Sulawesi Tenggara, dalam rangka memastikan dukungan Polri terhadap program nasional peningkatan gizi dan ketahanan pangan berjalan optimal.

Peninjauan tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita.

Dalam kunjungannya, Wakapolri memastikan seluruh proses operasional SPPG, mulai dari pengolahan bahan makanan hingga distribusi kepada masyarakat, telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

"Seluruh proses harus memenuhi standar kualitas, mulai dari bahan baku hingga makanan sampai ke penerima manfaat," ujar Dedi Prasetyo saat melakukan inspeksi di lokasi, Rabu.

Di wilayah Polda Sulawesi Tenggara,

saat ini terdapat 16 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 12 unit telah aktif beroperasi dan melayani lebih dari 22 ribu penerima manfaat, sementara empat unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.

SPPG sendiri berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan berfungsi sebagai pusat produksi serta distribusi makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan anak-anak usia sekolah.

Dalam kesempatan itu, Wakapolri juga menyerahkan secara simbolis bantuan paket gizi kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

"Kehadiran SPPG ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Dedi.

Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat, daerah, maupun aparat keamanan di lapangan.

"Sinergi men-

jadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," ujarnya.

Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap program ketahanan pangan, Polda Sulawesi Tenggara juga telah mengembangkan program pertanian dengan menanam jagung di lahan seluas 369 hektare yang menghasilkan ratusan ton produksi.

Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Secara historis, isu ketahanan pangan dan pemenuhan gizi telah menjadi perhatian global sejak dekade 1970-an, ketika krisis pangan dunia mendorong lahirnya berbagai kebijakan internasional melalui organisasi seperti Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Di Indonesia, program pemenuhan gizi juga telah berkembang sejak era Orde Baru melalui program perbaikan gizi masyarakat, yang kemudian diperkuat dengan berbagai kebijakan seperti Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada dekade 2010-an.

Transformasi kebijakan tersebut kini berlanjut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, salah satunya melalui pembentukan Badan Gizi Nasional serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menyangar kelompok rentan secara lebih luas.

Menurut Dedi, keberlanjutan program seperti SPPG menjadi bagian penting dalam memastikan generasi mendatang memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik.

"Kita ingin memastikan bahwa generasi masa depan Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan memiliki daya saing," tuturnya.

Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya evaluasi langsung di lapangan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah, tidak hanya di bidang keamanan, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. (*)

Kejari Buton Dampingi Dinkes Buton Selatan Kelola Anggaran Kesehatan



Laporan: Amran

BUTON SELATAN, BP-Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Buton dalam bentuk pendampingan hukum, Selasa (21/4/2026).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua pihak yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Buton.

Langkah ini difokuskan untuk memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan, dr. La Ode Achmad, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Sterry Fen-

dy Andih.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh seluruh kepala Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan, dr. La Ode Achmad, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari usulan resmi pihaknya kepada Kejari Buton.

Usulan tersebut disampaikan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna memperoleh pendampingan hukum dalam pengelolaan anggaran kesehatan.

Ia mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah menghadiri undangan ekspose yang dilanjutkan dengan proses penandatanganan PKS sebagai bentuk komitmen bersama.

Menurutnya, dukungan dari Kejaksaan Negeri Buton menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran

di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Selain pendampingan, pihak Kejari juga memberikan pembekalan terkait aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana publik.

Hal ini dinilai penting agar seluruh proses penggunaan anggaran dapat berjalan transparan serta terhindar dari potensi pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, dr. La Ode Achmad menyampaikan bahwa pendampingan hukum ini akan berlangsung selama satu tahun ke depan.

Ia berharap, program tersebut tidak hanya menjadi pengawasan, tetapi juga sarana edukasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan.

Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan tata kelola anggaran kesehatan di Kabupaten Buton Selatan dapat semakin tertib, transparan, dan akuntabel. (*)

Kejari Baubau dan Dinkes Bangun Sinergi Hukum untuk Masyarakat



Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di sektor kesehatan kembali ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri Baubau dan Dinas Kesehatan Kota Baubau

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di sektor kesehatan kembali ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri Baubau dan Dinas Kesehatan Kota Baubau di bidang perdata dan tata usaha negara, Senin (20/4/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi penguatan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, Muh Fakhuri, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah konkret menghadirkan hukum dalam praktik birokrasi sehari-hari.

"Kerja sama ini bukan hanya seremonial, tetapi komitmen agar hukum hadir nyata dalam pelayanan kesehatan," ujar Fakhuri dalam sambutannya.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kejari Baubau dengan dihadiri jajaran internal kejaksaan, termasuk para

kepala seksi, jaksa pengacara negara, serta pejabat struktural lainnya. Dari pihak Dinas Kesehatan, hadir Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Frederik Tangke Allo, bersama pejabat teknis dan fungsional.

Dalam konteks yang lebih luas, kerja sama ini mencerminkan peran kejaksaan sebagaimana diatur dalam perkembangan fungsi Jaksa Pengacara Negara di Indonesia sejak diperkuat melalui berbagai regulasi pascareformasi, termasuk perluasan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara.

Secara historis, peran kejaksaan dalam mendampingi institusi pemerintah mulai diperkuat sejak era reformasi 1998, ketika tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik meningkat. Secara global, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara melalui konsep state attorney atau penasihat hukum pemerintah untuk menjaga tata kelola yang baik.

Fakhuri menilai sektor kesehatan memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kebijakan, aset,

dan program kesehatan menjadi kebutuhan mendasak.

"Hukum tidak hanya hidup di ruang sidang, tetapi juga di ruang kerja tenaga medis, dalam pengelolaan anggaran, hingga pengamanan aset negara," kata Fakhuri.

Ia menambahkan, Kejari Baubau melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya untuk mendukung Dinas Kesehatan menjalankan tugasnya secara optimal.

Kerja sama ini juga diharapkan mampu mencegah potensi sengketa hukum, baik terkait pengelolaan aset, kontrak kerja sama, maupun kebijakan administratif di bidang kesehatan.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Baubau menyambut positif kolaborasi ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan modern yang tidak hanya bersifat teknis medis, tetapi juga administratif dan hukum.

"Sinergi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai aturan serta memberikan perlindungan bagi aparatur," ujar perwakilan Dinkes dalam kegiatan tersebut.

Dalam praktiknya, kerja sama ini akan mencakup pendampingan hukum, pemberian opini hukum (legal opinion), hingga representasi dalam penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip good governance dan clean government yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam setiap proses pemerintahan.

Fakhuri berharap kerja sama ini menjadi titik awal hubungan jangka panjang yang produktif antara kedua institusi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah.

"Mari kita kuatkan komitmen dan dukungan agar tujuan kerja sama ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Dengan penandatanganan ini, Kejari Baubau dan Dinas Kesehatan Kota Baubau menegaskan komitmen bersama untuk membangun sistem pelayanan publik yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. (*)

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Resmikan GOW 2026-2031, Fokus Stunting dan Literasi



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar pembangunan melalui penguatan pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Baubau masa bakti 2026-2031. Penguatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Selasa (21/04/2026).

Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, dalam arahannya menyebut perempuan sebagai kekuatan utama dalam mendorong kemajuan daerah. Ia menilai kontribusi perempuan sangat strategis, terutama dalam membangun keluarga yang menjadi fondasi masyarakat.

"Perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi kekuatan utama pembangunan yang harus terus diberdayakan," ujar Yusran Fahim dalam sambutannya.

Pengurus GOW periode terbaru dipimpin oleh Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Baubau. Kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa energi baru dalam memperkuat sinergi organisasi perempuan di daerah tersebut.

Menurut Yusran, pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan arah gerak organisasi perempuan ke depan. GOW diharapkan mampu menjadi ruang bersama yang inklusif bagi berbagai organisasi wanita.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi, termasuk dengan TP

PKK, Dharma Wanita, serta elemen masyarakat lainnya guna mempercepat pencapaian program pembangunan berbasis gender.

"GOW harus menjadi pelopor perubahan yang mampu menyatukan potensi perempuan dari berbagai latar belakang untuk tujuan bersama," katanya.

Dalam konteks program kerja, Wali Kota Baubau menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah percepatan penurunan angka stunting, di mana peran ibu dinilai krusial dalam menjaga kesehatan dan gizi keluarga.

Selain itu, perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan juga menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah daerah mendorong adanya langkah konkret dan sistematis dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

"Perlindungan perempuan dan anak harus menjadi gerakan bersama, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Di era transformasi digital, peningkatan literasi teknologi bagi perempuan juga menjadi agenda penting. Menurut Yusran, kemampuan digital akan membuka peluang lebih luas bagi perempuan dalam mengakses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Baubau, jumlah perempuan mencapai sekitar 51,2 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang harus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara historis, peran perempuan dalam pembangunan telah menjadi perhatian global. Sejak Konferensi Dunia Perempuan di Beijing tahun 1995 yang menghasilkan Beijing Declaration and Platform for Action, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi agenda penting di berbagai negara.

Di tingkat nasional, komitmen tersebut juga diperkuat melalui kebijakan pengarusutamaan gender yang mulai diimplementasikan sejak awal 2000-an, serta berbagai program pemberdayaan yang terus dikembangkan hingga saat ini.

Momentum penguatan GOW di Baubau ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan global dan nasional tersebut, di mana perempuan didorong untuk berperan aktif dalam seluruh aspek pembangunan.

Wali Kota Baubau juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus GOW periode sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan. Ia berharap kepemimpinan baru mampu melanjutkan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.

Menutupi sambutannya, Yusran Fahim mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan.

"Tantangan ke depan tidak ringan, tetapi dengan kebersamaan dan komitmen, saya yakin GOW mampu menghadirkan program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Penguatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran perempuan di Kota Baubau dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)